

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bastian, Indra. (2006). *Suatu Pengantar: Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.

Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Machmudin, Dudu Duswara. (2003) *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT. refika Aditama

Gulo, W. (2002). *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo.

Gunawan, Iman. (2013). *Metode Penelitian kualitatif*. Malang: PT Bumi Aksara.

H.R., Ridwan. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ilmar, Aminuddin. (2016). *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta:Prenada Group.

Kunto, S. A. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Masriani, Yuliestiesna (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Saidi, M.Djafar. (2016). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo

Suryabrata, Sumardi. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.

Suwanda, Dadang.(2014). *Dana Hibah & Bantuan Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soekanto, Sorjono. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soeroso.(2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Thaib, H. D., Hamidi, J., & Huda, Nikmatul. (2015). *Teori dan Hukum Konstitusi* . Jakarta: Rajawali Press.

Tjandra, W. Riawan. (2014). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisatawan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolahan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional

Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelohan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Dan Dampak Akibat Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*

Keputusan Menteri Dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. KM/704/PL.07.02/M-K/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata Dan

Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif  
Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 Tentang Petunjuk Teknis Hibah  
Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun  
Anggaran 2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-V11/2009

**Website**

<https://fajar.co.id/2020/11/16/bantu-hotel-dan-restoran-pemkot-siapkan-dana-hibah-rp34-miliar/> diakses 10 Maret 2022

<https://sulawesi.bisnis.com/read/20210111/539/1341446/waduh-belum-sempat-dimanfaatkan-makassar-kembalikan-dana-hibah-kemenparekraf> diakses 10 Maret 2022